



Keterlibatan Masyarakat Kelurahan Bansir Laut Mengelola Lingkungan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh

Ahmad Daim^{1*}, Afandi², Thomy Sastra Atmaja³

^{1,3} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura

² Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura

* ahmaddaim454@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 2nd September 2025

Revised: 11th September 2025

Accepted: 21st September 2025

Keywords:

Civic Engagement
Kawasan Kumuh
KotaKu
Pengelolaan
Lingkungan

ABSTRACT

This study examines the role of civic engagement in addressing urban slum issues, specifically through the Slum-Free City (KoTaKu) program in Bansir Laut Village, Pontianak. Using a qualitative approach, this research describes the various forms of citizen participation observed at every stage of the program, from planning to sustained implementation. The findings indicate that civic engagement is demonstrated through the proactive attitudes and behaviors of residents, supported by strong motivation and economic incentives. However, the program faced obstacles such as a lack of opportunity due to residents' busyness, social jealousy, and resistance from some community members. These challenges were successfully managed through incremental socialization, capacity building, and conflict resolution. Overall, civic engagement through the KoTaKu program proved to be a crucial step in creating a more livable and productive residential environment and improving community welfare. It is important to note that these findings are specific to Bansir Laut Village and may not be generalizable to other locations, as each community has its own unique social, economic, and dynamic characteristics.



*This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.
©2025 by the author(s).*

Corresponding Author:

Ahmad Daim
Universitas Tanjungpura
ahmaddaim454@gmail.com

PENDAHULUAN

Arus urbanisasi yang tidak diimbangi dengan penyediaan ruang, sarana dan prasarana permukiman yang cukup akan mengakibatkan munculnya kawasan kumuh di perkotaan (Yamri, 2016). Permukiman ini muncul karena masyarakat berpenghasilan rendah lebih memilih di daerah yang tersedia dan tidak mengeluarkan banyak biaya untuk menyewanya. Di wilayah tersebut mereka bersaing memenuhi segala kebutuhan hidupnya (Kholqi & Alfirdaus, 2020). Penyebab lain munculnya permukiman kumuh di perkotaan disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta kurangnya pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan lingkungan permukiman dan pemberdayaan keterlibatan masyarakat (Sari & Ridlo, 2022).

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan upaya untuk mengelola lingkungan di permukiman kumuh, melalui empat indikator yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (Purnaweni, 2014). Selain itu pengelolaan lingkungan juga harus memperhatikan prinsip pembangunan permukiman seperti kesetaraan, keberpihakan kepada masyarakat miskin, berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Idealnya pengelolaan permukiman kumuh menerapkan konsep pemberdayaan yaitu penyiapan masyarakat melalui pemberdayaan sosial, pemanfaatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat (Supriyatno, 2020).

Kota Pontianak merupakan salah satu kota yang memiliki kawasan permukiman kumuh. Namun, kota ini memiliki program pengelolaan lingkungan yang menerapkan keterlibatan masyarakat, yaitu: program Kota Tanpa Kumuh (KoTaKu). Program ini dilaksanakan di Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara. Program KoTaKu adalah usaha mempercepat penanganan permukiman kumuh dan meningkatkan akses pelayanan dasar dan infrastruktur kawasan kumuh perkotaan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan permukiman yang produktif, layak huni dan berkelanjutan (Saleh, 2021). Dalam pelaksanaannya, program KoTaKu memprioritaskan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapannya.

Keterlibatan ini dapat dikategorikan sebagai *civic engagement*, yaitu sikap dan tindakan masyarakat secara individu maupun kolektif untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang menjadi perhatian publik. *Civic engagement* ini dapat menciptakan *civil society* sebagai pilar demokratis masyarakat yang sehat (Setiawan, 2018). Keterlibatan masyarakat sangatlah penting dalam pengelolaan lingkungan, sebab masyarakat mempunyai tanggungjawab dan didorong untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung (Ekiawan, 2021). Keterlibatan masyarakat seperti ini diharapkan mampu menjadi strategi pengelolaan lingkungan dengan menciptakan transformasi dan kapasitas teknik pengelolaan yang berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu juga membahas tentang pengelolaan lingkungan berbasis lingkungan di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia, seperti: Pekanbaru, Bekasi dan Kabupaten Lima Puluh Kota (Asari & Fadjarani, 2022; Resa, 2017; Handika & Yusran, 2020; Supriyatno, 2020). Penelitian lainnya juga melihat partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana lingkungan dengan berbasis komunitas (Makhmudi & Muktiali, 2018). Belum ada yang melihat secara spesifik di Kota Pontianak, sehingga penelitian ini difokuskan pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara. Artikel ini juga membahas bentuk keterlibatan, faktor yang mempengaruhi keterlibatan dan upaya menangani hambatan keterlibatan.

METODE

Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk melihat keterlibatan masyarakat mengelola lingkungan melalui program Kota Tanpa Kumuh (KoTaKu) di Kelurahan Bansir Laut. Informan penelitian meliputi: Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pontianak, Lurah, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) serta Masyarakat Bansir Laut. Informan penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling* untuk memperoleh generalisasi dari sample yang dipelajari (Firmansyah & Dede, 2022).

Sumber data primer berasal dari subjek penelitian (informan), sementara sumber data sekunder berupa dokumentasi, arsip maupun artikel (Wahidmurni, 2017). Pengumpulan data lapangan dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, display data dan penarikan kesimpulan (Wiwin Yuliani, 2018). Pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk meningkatkan akurasi data penelitian (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dengan GDS selaku Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak menyatakan bahwa dalam implementasi program KoTaKu telah melibatkan masyarakat dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam setiap programnya. Kegiatan ini dilakukan secara swakelola tipe 4, yaitu berdasarkan usulan kelompok masyarakat serta diawasi oleh kompok masyarakat pelaksana swakelola.

Adapun keterlibatan masyarakat terhadap program KoTaKu, berdasarkan hasil wawancara dengan YP selaku Lurah dinyatakan bahwa masyarakat dilibatkan mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan dilanjutkan sampai dengan tahap berkelanjutan dan berkala. Secara lengkap keterlibatan masyarakat Bansir Laut dalam pengelolaan lingkungan Permukiman Kumuh dalam Program KoTaKu adalah sebagai berikut :

a. Keterlibatan Masyarakat dalam Tahap Persiapan

Masyarakat memulai dengan mengikuti sosialisasi awal yang diselenggarakan oleh pihak kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan WLH selaku Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat, beliau mengatakan bahwa masyarakat antusias menghadiri kegiatan program yang diselenggarakan di wilayahnya. Selain sosialisasi, masyarakat juga dilibatkan dalam rembug kesiapan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membangun kepedulian dan komitmen masyarakat untuk ikut terlibat dalam penataan permukiman. Keterlibatan masyarakat dalam tahap persiapan juga terlihat pada keikutsertaan masyarakat secara sukarela dalam Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP). ZA salah satu warga yang diwawancarai mengatakan bahwa dia ingin terlibat aktif dan mengawal proses penataan kawasan permukiman di wilayahnya.



Gambar 1. Sosialisasi Awal Konsolidasi Tanah Bagi masyarakat Bansir Laut
Sumber : Arsip Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanian



Gambar 2. Sosialisasi Program KoTaKu dan Perencanaan TIPP
Sumber: Dokumentasi Penulis

b. Keterlibatan Masyarakat dalam Tahap Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan WU yang juga ikut sebagai relawan TIPP mengatakan bahwa pada tahap perencanaan, masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatan visi dan misi pengelolaan lingkungan. Kegiatan ini dilakukan melalui refleksi kritis, pemetaan keswadayaan masyarakat dan penyusunan rencana penataan lingkungan permukiman (RPLP). NR selaku Ketua RT 3 RW 3 menambahkan bahwa masyarakat juga melaporkan kondisi lingkungannya melalui forum RT/RW atau dalam musyawarah di Kelurahan. Hal ini merupakan wujud dari tanggung jawab

masyarakat dalam pengambilan keputusan rencana pemetaan lingkungan. Selain itu masyarakat yang ikut dalam pembangunan infrastruktur juga diberikan pelatihan pertukangan.



Gambar 3. Petugas menyerap Aspirasi dan Pemetaan keswadayaan Masyarakat Bansir Laut
Sumber: Arsip Kelurahan Bansir Laut



Gambar 4. Pelatihan Pertukangan
Sumber : Dokumentasi Pribadi

c. Keterlibatan Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terdiri dari kegiatan infrastruktur, ekonomi dan sosial. Pada kegiatan infrastruktur, masyarakat terlibat dalam pembangunan dan revitalisasi lingkungan seperti Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Konsolidasi Tanah dan pembangunan jembatan dan jalan lingkungan. Ini menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan infrastruktur adalah dengan menjadi tukang bangunan seperti yang dilakukan dirinya. Sebelum direkrut dalam proyek infrastruktur biasanya tukang diberikan pelatihan langsung oleh Tim KoTaKu Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan kapasitas tukang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan GDS, pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat dilakukan dengan ikut menjadi peserta dalam pelatihan tenun corak insang yang diselenggarakan oleh KoTaKu. Kegiatan ini menggandeng Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Selain itu masyarakat juga terlibat aktif dalam acara bazar yang diselenggarakan dalam rangka pemasaran produk lingkungan. Selain itu, pelaku usaha Topi Caping serta pelaku usaha lainnya juga mendapatkan bantuan dana komunitas.

Pada pelaksanaan kegiatan sosial, SLM mengatakan bahwa masyarakat menjadi pengurus Perpustakaan Bahagia Mendawai dan Bank Sampah Berkah Mendawai. Selain itu, masyarakat juga mengambil bagian menjadi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Gayung Bersambut, Pengurus Sekolah Sungai dan Pengurus Rumah Budaya Bansir. Mereka mendapatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas kelembagaan terkait dengan pengelolaan lingkungan. Setelah mendapatkan pelatihan, komunitas peduli lingkungan tersebut memberikan edukasi yang nyata sesuai bidangnya kepada masyarakat secara luas terkait menjaga lingkungan permukiman agar tidak kumuh.



Gambar 5. Pelaksanaan Pembangunan Jalan lingkungan dan Monitoring dari Dinas PRKP
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 6. Pemasaran Produk Lingkungan
Sumber: Arsip Kelurahan Bansir Laut

d. Keterlibatan Masyarakat dalam Tahap Berkelanjutan

Pada tahap ini, masyarakat aktif mengikuti forum-forum yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat peduli lingkungan. NR selaku RT menjelaskan bahwa setiap seminggu sekali ada pertemuan pengurus sekolah sungai yang memberikan edukasi kepada anak-anak. Selain itu menurut AL warga Kampung Mendawai mengatakan biasanya masyarakat secara rutin menyetorkan sampah rumah tangga untuk ditampung dan diolah oleh Bank Sampah Berkah Mendawai. Terkadang ada juga pelatihan produk kerajinan yang diselenggarakan oleh pihak Bank Sampah.

Berikutnya keterlibatan masyarakat pada tahap berkelanjutan ini adalah ikut dalam pembangunan kolaboratif dengan berbagai pihak. SI menambahkan bahwa pada tahap ini masyarakat juga diikuti dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat RT/RW dan di tingkat kelurahan dengan memberikan usulan dan gagasan terhadap pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.



Gambar 7. Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 8. Aktivitas Pengelolaan Sampah di Bank Sampah
Sumber: Arsip Kelurahan Bansir Laut

e. Keterlibatan Masyarakat dalam Tahap Berkala

Pada tahap keterlibatan ini, masyarakat ikut dalam memonitoring dan mengevaluasi program KoTaKu yang telah dilaksanakan untuk memastikan keterlibatan tersebut tepat sasaran dan mencapai target pengurangan luas kumuh. Selain itu menurut AL masyarakat juga melakukan perawatan dan pemeliharaan objek vital hasil dari implementasi program KoTaKu yang sering disebut sebagai *Cash For Work*. Kegiatan *Cash For Work* ini dilaksanakan oleh Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan bekerja sama dengan masyarakat dalam gotong royong yang dilakukan secara rutin sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Pada tahap ini juga terdapat pengembangan kapasitas berupa sosialisasi lanjutan yang diikuti oleh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat serta tumbuhnya inovasi dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman.



Gambar 9. Pemasangan Banner CFW
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 10. Gotong Royong Warga Bansir Laut
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pengelolaan lingkungan juga erat kaitannya dengan penegakan hukum administrasi lingkungan hidup. Di Indonesia negara mengatur mengenai penegakan sanksi administrasi lingkungan hidup dimana negara dapat mengatur mengenai setiap kegiatan dan atau usaha di bidang lingkungan hidup (Sriyanti, 2023). Pada program KoTaKu, prinsip pembangunan yang berkelanjutan memperhatikan kesetaraan, keberpihakan pada penduduk miskin dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat (Ervianto & Felasari, 2019). Edukasi atau pengembangan kapasitas dalam setiap tahapan program sangatlah dibutuhkan agar masyarakat dapat meningkatkan kapasitas dirinya dalam pengelolaan lingkungan.

Merujuk pada pendapat (Hasriani et al., 2022) bahwa dalam implementasi program KoTaKu menekankan pada keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Namun, partisipasi hanya dilakukan oleh beberapa masyarakat yang terwakilkan dalam bentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan hanya cenderung pengambilan manfaat dari adanya program KoTaKu. Hal ini dapat memberikan efek buruk bagi hasil program yang nantinya bisa ditinggalkan masyarakat karena dirasa sudah tidak memiliki manfaat lagi (Efendi & Prastiyo, 2020). Apalagi keterlibatan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan adalah bentuk dari pemberdayaan masyarakat secara nyata pada pengelolaan

lingkungan, sebab nantinya masyarakat itu sendiri yang akan menikmati hasil program KoTaKu tersebut (Hasba & Syahrul, 2018). Keterlibatan masyarakat pada tahap berkelanjutan, kegiatan menerus dan berkala memberikan ruang bagi masyarakat dalam berinovasi pada pencegahan dan pengembangan kualitas permukiman dan bentuk konsistensi masyarakat peduli lingkungan.

Keterlibatan masyarakat dalam program KoTaKu dikategorikan sebagai *civic engagement as social change* yang akan mengarah kepada pembentukan *civil society* (Setiawan, 2018). *Civic engagement* merupakan sebuah tindakan baik individu maupun secara kolektif dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang menjadi perhatian publik (Gusmadi, 2018). Sikap dan perilaku masyarakat diharapkan mampu membawa perubahan sosial serta kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya (Kezia, 2017). Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan selain sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat juga sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Keterlibatan aktif masyarakat haruslah berfokus pada transformasi manajemen dan kapasitas teknis sehingga manajemen pengelolaan lingkungan akan berfungsi dengan baik. Hal ini memungkinkan masyarakat dapat membuat perencanaan yang rasional, mengambil keputusan, melaksanakannya, mengelola dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan serta mampu mengembangkan pengelolaan lingkungan (Supriyatno, 2020).

Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh

Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat kelurahan Bansir Laut dalam mengelola lingkungan melalui program KoTaKu, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan adalah kemauan masyarakat untuk terlibat aktif dalam program. ZA mengatakan dirinya ikut menjadi relawan program KoTaKu karena ingin terlibat aktif dan mengawal pelaksanaan program yang akan dilaksanakan di lingkungannya. AL juga menambahkan dirinya ikut terlibat dalam pengelolaan lingkungan karena ingin memberikan upaya nyata terhadap lingkungan permukiman. Di samping itu, menurut GDS keterlibatan masyarakat didasarkan pada motif ekonomi, bagi mereka yang menjadi tukang pada pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Gencarnya sosialisasi dan pengenalan program baik dari BKM, tim KoTaKu dan juga Kelurahan menjadi salah satu pemantik masyarakat untuk terlibat dalam program ini.

Sedangkan faktor yang menghambat keterlibatan masyarakat menurut YP adalah kurangnya kesempatan untuk ikut andil dalam program KoTaKu. Hal ini terjadi akibat kesibukan masyarakat bekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu terjadi kecemburuan sosial akibat tidak mendapatkan manfaat bantuan program, seperti yang disampaikan oleh NR bahwa ada warganya yang mengeluhkan tidak menerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Faktor lain yang menghambat keterlibatan masyarakat adalah sebagian menolak untuk dipindahkan karena rumahnya berada di kawasan zona hijau dan berbatasan langsung dengan Sungai Kapuas. JI juga menambahkan penolakan juga terjadi pada program konsolidasi tanah dan pelebaran jalan lingkungan, beberapa warga menolak program tersebut karena rumah dan tanah mereka menyempit sedangkan ganti kerugian yang diberikan dinilai kurang.

Kemauan atau kesukarelaan menjadi salah satu faktor yang mendukung partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam program KoTaKu. Faktor ekonomi karena masyarakat memperoleh imbalan jasa dari ambil bagian tim KoTaKu juga memicu keterlibatan masyarakat (Tiviyanto et al., 2019). Hal lainnya adalah kesibukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi

faktor penghambat keterlibatan masyarakat sebab mereka tidak memiliki waktu atau hanya melibatkan diri pada program KoTaKu pada waktu luang saja (Wastuti et al., 2020). Hambatan ini berpengaruh terhadap keefektifan program KoTaKu.

Upaya Menangani Hambatan Keterlibatan Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesibukan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonominya, adalah dengan penyesuaian waktu. Misalnya untuk rembug warga tingkat RT/RW dilaksanakan pada malam hari dan sosialisasi diselenggarakan pada hari libur untuk memaksimalkan masyarakat yang ikut serta. Selain itu masyarakat juga dapat melakukan kontrol atau monitoring terhadap program KoTaKu yang sedang berjalan dan dapat mengadukan apabila terjadi ketidaksesuaian pada pelaksanaan program kepada pihak kelurahan dan tim KoTaKu.

Dalam mengatasi hambatan penolakan menurut WLH masyarakat diberikan pengertian bahwa pelebaran jembatan dan jalan lingkungan memberikan dampak positif terhadap aktifitas ekonomi masyarakat. Selain itu tim KoTaKu menggandeng badan pertanahan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya konsolidasi tanah. Hal ini dilakukan untuk memberikan hak legalitas terhadap tanah dan bangunan yang ditempati oleh masyarakat. Ganti rugi yang diberikan juga sudah melalui kajian dan menurut masyarakat, sudah sebanding dengan kerugian yang dialami masyarakat dengan adanya program tersebut.

Merujuk pada pendapat (Rohimah et al., 2019) strategi yang sebaiknya digunakan dalam meningkatkan kepedulian, kesadaran serta keterlibatan masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi secara bertahap dan terus menerus. Selain itu edukasi juga diperlukan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat agar pengelolaan lingkungan permukiman melalui program KoTaKu menjadi inovatif. Kelompok masyarakat seperti: Pengurus Bank Sampah Berkah Mendawai dan Bank Sampah Maju Sejahtera, Pengurus Sekolah Sungai dan Kelompok Karang Taruna yang ada di kelurahan Bansir Laut secara rutin mendapatkan pelatihan dari pihak kelurahan dan dinas terkait. Hal ini dilakukan agar kelompok masyarakat tersebut mampu menjadi pelopor dalam meningkatkan kesadaran lingkungan yang menciptakan kemandirian. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah: mengakomodasi tentang tata guna lahan, mobilitas penduduk, pemanfaatan energi terbarukan, meningkatkan ekonomi perkotaan, pembangunan sosial, dan aksesibilitas (Ervianto & Felasari, 2019). Sehingga upaya untuk mengentaskan kawasan kumuh dan meningkatkan akses sarana dan prasarana dalam mewujudkan kawasan permukiman yang bersih, produktif dan berkelanjutan dapat tercapai dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa program KoTaKu di Kelurahan Bansir Laut adalah contoh nyata dari *civic engagement* yang sukses. Keterlibatan aktif masyarakat dalam program ini, mulai dari tahap persiapan hingga keberlanjutan, menjadi kunci utama dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni, produktif, dan sejahtera. Partisipasi warga tercermin dari sikap dan perilaku mereka di setiap tahapan program. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai faktor seperti motivasi dan kepedulian masyarakat, serta komitmen pemerintah. Meskipun demikian, program ini juga menghadapi hambatan seperti kesibukan warga, kecemburuan sosial, dan penolakan. Berbagai hambatan tersebut berhasil diatasi melalui pendekatan seperti sosialisasi dan edukasi bertahap. Namun, penting untuk dicatat bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi secara luas karena hanya berfokus pada satu lokasi spesifik, yaitu Kelurahan Bansir Laut. Oleh karena itu, penerapan hasil ini pada konteks atau lokasi lain mungkin memerlukan penyesuaian.

REFERENSI

- Asari, R., & Fadjarani, S. (2022). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. *Jurnal Geografi*, 15(1), 56–67. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG/index>
- Efendi, D., & Prastiyo, E. B. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh KOTAKU (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kemboja Kota Tanjungpinang). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 8(1), 41–47. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v8i1.3090>
- Ekiawan, M. A. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 311. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>
- Ervianto, W. I., & Felasari, S. (2019). Pengelolaan Permukiman Berkelanjutan di Perkotaan. *Jurnal Spektran*, 7(2), 178–186. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jsn/index>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- Gusmadi, S. (2018). Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 9(1), 105–117.
- Handika, V., & Yusran, R. (2020). Implementasi Program Kotaku dalam Upaya Mengatasi Pemukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Journal of Civic Education*, 3(3), 277–286. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.397>
- Hasba, S., & Syahrul. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan : Kasus Kelurahan Bungguosu, Konawe. *Shautut Tarbiyah*, 24(1), 196–212. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/str.v24i1.924>
- Hasriani, Muhammadiyah, & Parawu, H. E. (2022). Implementasi Strategik Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Pada Kantor Badan Perencanaan. *KIMAP; Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 3(1), 78–94. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/5357/4742>
- Kezia, R. (2017). Perbedaan Tingkat Civic Engagment Pada Mahasiswa Yang Mengikuti Komunitas Di Perguruan Tinggi Berdasarkan Jenis Kelamin. *Repositori Universitas Sanata Dharma*, i–55. <https://repository.usd.ac.id/17769/>
- Kholqi, A., & Alfirdaus, L. K. (2020). Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan

- Karangwaru). *Jurnal Studi Politik dan Pemerintahan*, 9(2), 1–15.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/27268>
- Makhmudi, D. P., & Muktiali, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Pada Program Penataan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(2), 108–117.
<https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.108-117>
- Purnaweni, H. (2014). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kedeng Utara Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12(1), 53–65.
- Resa, A. M., Saam, Z., & Tarumun, S. (2017). Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 4(2), 117.
<https://doi.org/10.31258/dli.4.2.p.117-127>
- Rohimah, S., Ilham, M., & Lumkan, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Sayang Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Visioner*, 11(5), 821–833.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jv.v11i%605.248>
- Saleh, D. (2021). Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Sukabumi. *JIP Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2(5), 1557–1564. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i5.934>
- Sari, A. R., & Ridlo, M. A. (2022). Studi Literature : Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 160.
<https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20022>
- Setiawan, A. A. (2018). Komunitas "ICK Kalten" : Civic Engagement Sebagai Upaya Pembentukan Civil Society. In R. Winarno, Wijianto, Rini Triastusi (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018* (pp. 1–10). Laboratorium Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
<https://ppkn.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2018/08/Prosiding-Seminar-Nasional-PPKn-2018-2.pdf>
- Sriyanti. (2023). Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)*, 1(2).
- Supriyatno, B. (2020). The attitude and role of Bekasi City government in slum areas. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 30(2), 228–242.
<https://doi.org/10.1080/10911359.2019.1676359>
- Tiviyanto, D., Irawan, B., & Paselle, E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 7(2), 8892–8905.

- Wahidmurni. (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. Research Respository, 1–17. <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/>
- Wastuti, A., Purnaweni, H., & Rahman, A. Z. (2020). Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Partisipasi masyarakat dalam program kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 10(4), 10–20. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/31741>
- Wiwin Yuliani. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif bimbingan dan Konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Yamri, A. (2016). Studi Penanganan Terpadu Kawasan Permukiman di Tepian Sungai Kapuas Kota Pontianak. *Teknik Sipil Universitas Tanjungpura*, 16(1), 1–16. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23428/jtsft.v16i1.24927>